

**SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGATASI SAMPAH DI PANTAI
NABIRE KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH**

Alfredo Novilus Awakhe Jocku

NPP. 32. 1039

Asdaf Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 32.1039@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Dadang Supriatna, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Lack of handling of waste disposal problems at Nabire Beach, Nabire Regency, which has caused negative impacts on the surrounding environment. **Purpose:** This study aims to determine the form of synergy between Satpol PP and the Environmental Agency in regulating waste disposal at Nabire Beach. **Method:** The research method used by researchers in this study is a descriptive qualitative research method. The data collection techniques used are interviews and documentation. Meanwhile, data analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results of the study obtained by researchers indicate that the synergy between Satpol PP and the Environmental Agency is reflected in the form of coordination, division of roles, and cooperation in implementing activities in the field. **Conclusion:** The implementation of synergy between the two has not been running optimally because there are still obstacles such as lack of human resources and facilities, and lack of coordination in carrying out tasks. Waste management still faces quite complex challenges. Despite the synergy of the two agencies, the problem of high waste volume and lack of public awareness are still major obstacles.

Keywords: Synergy, Satpol PP, Environmental Agency, Waste.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kurangnya penanganan permasalahan pembuangan sampah di Pantai Nabire Kabupaten Nabire yang menyebabkan dampak buruk pada lingkungan sekitar. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup dalam penertiban pembuangan sampah di Pantai Nabire. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup tercermin dalam bentuk koordinasi, pembagian peran, serta kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. **Kesimpulan:** Implementasi sinergitas antara keduanya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala seperti, kekurangan sumber daya manusia dan fasilitas, serta kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Pengelolaan sampah masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Meskipun Sinergi dari kedua instansi, permasalahan volume sampah yang tinggi dan kurangnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama.

Kata Kunci: Sinergitas, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Sampah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sampah merupakan masalah global yang berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan, dan ekonomi (Mahajan, 2023). Sampah dapat dikelompokkan menjadi sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya atau limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Sampah organik terdiri dari bahan-bahan yang dapat terurai secara alami, seperti sisa makanan dan dedaunan. Sampah anorganik, seperti plastik, logam, dan kaca, sulit terurai dan sering kali didaur ulang untuk mengurangi penumpukan di tempat pembuangan akhir. Sampah berbahaya, seperti bahan kimia, baterai, dan elektronik, memerlukan penanganan khusus untuk mencegah kontaminasi lingkungan (Shreya et al., 2023).

Selain itu, sampah juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Pengelolaan sampah yang buruk dapat mengurangi kualitas hidup, terutama di daerah perkotaan yang padat. Bau yang tidak sedap, pemandangan yang kumuh, serta risiko penyakit dari tempat pembuangan sampah yang tidak teratur menjadi masalah bagi masyarakat. Minimnya sistem pengangkutan sampah yang teratur berdampak pada praktik pembuangan liar (Hazheer et al., 2023). Ketidakteraturan sistem pengumpulan sampah mendorong masyarakat melakukan pembuangan ilegal atau pembakaran terbuka, yang menimbulkan masalah dalam pengelolaan dan pemilahan sampah (Akomea-Frimpong et al., 2024). Pengelolaan sampah yang tidak tepat (yang mencakup pembuangan sembarangan) merupakan penyebab utama degradasi lingkungan dan masalah kesehatan (Mwanza, 2024). Namun, dengan pengelolaan sampah yang efektif, seperti melalui daur ulang dan pengomposan, sampah dapat diubah menjadi sumber daya yang bermanfaat, mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam, dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih serta sehat.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan pedoman menyeluruh tentang penanganan sampah di Indonesia. Tujuan utama undang-undang ini adalah menghindari dampak buruk sampah terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan sumber daya alam. Pengelolaan sampah dalam undang-undang ini terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui berbagai upaya, seperti mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, mendaur ulang, serta memanfaatkan kembali material yang masih dapat digunakan.

Undang-undang ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur yang mendukung pengelolaan sampah, termasuk fasilitas yang memadai dan regulasi yang mendorong perilaku ramah lingkungan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, termasuk dalam hal penertiban pembuangan sampah (Hendra et al., 2024). Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mengurangi permasalahan sampah di Indonesia dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Kabupaten Nabire memiliki peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2013 bab V tentang tertib lingkungan pasal 17 ayat 1 dan 2 dimana bunyi ayat 1 ialah, “setiap orang dilarang membuang sampah bukan pada tempatnya”, ayat 2 “setiap orang diwajibkan menjaga dan memelihara kebersihan di lingkungan masing-masing maupun pada tempat umum”. Rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Nabire dalam mengelola sampah menjadi salah satu faktor utama yang memicu pencemaran lingkungan, terutama di area wisata Pantai Nabire. Meski pantai ini cukup populer dan sering dikunjungi, perilaku pengunjung yang membuang sampah sembarangan mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kebersihan. Sampah-sampah dari aktivitas seperti makan dan minum, misalnya kemasan makanan dan botol plastik, kerap dibuang ke tepi pantai atau dibiarkan di tempat mereka berkumpul, tanpa mempertimbangkan dampak buruknya terhadap lingkungan sekitar.

Satpol PP sebagai lembaga yang bertugas menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan pengelolaan sampah di pantai. Dengan kewenangannya, Satpol PP dapat melakukan penertiban dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan terkait pembuangan sampah. Selain itu, Satpol PP juga dapat berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kesadaran warga terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah secara lebih bertanggung jawab. Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire memiliki tanggung jawab utama dalam merancang dan mengimplementasikan program pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup sangat penting untuk menciptakan lingkungan pantai yang lebih bersih dan sehat. Dengan sinergi yang kuat antara penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat, masalah sampah di Pantai Nabire dapat ditangani secara efektif, demi terciptanya lingkungan yang lebih lestari.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penanganan permasalahan pembuangan sampah di Pantai Nabire Kabupaten Nabire, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Nabire dalam mengelola sampah menjadi salah satu faktor utama yang memicu pencemaran lingkungan, terutama di area wisata Pantai Nabire. Meski pantai ini cukup populer dan sering dikunjungi, perilaku pengunjung yang membuang sampah sembarangan mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kebersihan. Sampah-sampah dari aktivitas seperti makan dan minum, misalnya kemasan makanan dan botol plastik, kerap dibuang ke

tepi pantai atau dibiarkan di tempat mereka berkumpul, tanpa mempertimbangkan dampak buruknya terhadap lingkungan sekitar.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu tentang penanganan permasalahan pembuangan sampah yang menyebabkan dampak buruk pada lingkungan sekitar. Penelitian Petty Sari Sitompul berjudul Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan ketertiban kebersihan dan keindahan wilayah perkotaan di kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Sitompul, 2019), menemukan bahwa partisipasi pro aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kotawaringin Timur telah berjalan dengan baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah setempat dengan komunitas masyarakatnya. Sinergi Satpol PP dan DLH sebagai kunci berjalannya program K3 di wilayah perkotaan. Penelitian Azriel Shah Pahlevi berjudul Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di kota Tangerang Selatan Provinsi Banten (Pahlevi, 2024), menemukan bahwa penghambat dalam pelaksanaan strategi pengelolaan sampah berkelanjutan adalah terus bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan meningkatnya jumlah timbulan sampah dan kurangnya kesadaran serta wawasan masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan yang baik. Penyusunan strategi pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan berfokus pada penguatan implementasi regulasi, pengembangan sumber daya manusia, optimalisasi sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi dan inovasi. Penelitian Maulana Wahiduddin Ahmad berjudul Analisa terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban pembuangan sampah di kota Pekanbaru Provinsi Riau (Ahmad, 2024), menemukan bahwa tujuan, kebijakan, dan program Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat sudah berjalan dengan baik. Walaupun dalam prosesnya masih terdapat hambatan yang dialami Satpol PP baik karena faktor eksternal maupun internal. Penelitian Mohammad Nur Shobah berjudul Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan Wilayah Perkotaan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah (Shobah, 2023), menemukan bahwa sinergitas Satpol PP dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah belum maksimal, meskipun begitu perlu diapresiasi usaha yang dilakukan Satpol PP dan DinLH guna mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Hal ini sebab Satpol PP dan DinLH telah berupaya sebisa mungkin dengan segala keterbatasan yang ada. Satpol PP dan DinLH juga sudah berusaha melakukan komunikasi dengan berbagai cara. Selain itu juga kedua instansi ini juga sudah koordinasi guna mewujudkan hal tersebut. Penelitian Linda Trisyani berjudul Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan kota dalam mewujudkan keindahan kota Banda Aceh (Trisyani, 2019), menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh memiliki peran yang bagus dalam mewujudkan keindahan Kota Banda Aceh, hal ini dapat di lihat dari indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan(DLHK3) Kota Banda Aceh yang telah dijelaskan dalam renstra. Meskipun demikian Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan (DLHK3) Kota Banda Aceh masih memiliki

PR yang harus segera diselesaikan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan (DLHK3) Kota Banda Aceh terutama mengenai sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan Kota. Penelitian M Harry Mulya Zein, Syifa Jouhairiah Mahedar, dan Sisca Septiani berjudul Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah: Evaluasi Model Governance di Indonesia (Harry Mulya Zein et al., 2024), menekankan pentingnya komitmen dan transparansi dalam proses kolaboratif untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Ambon.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan membahas sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup dalam penertiban pembuangan sampah. Perbedaan berikutnya terletak pada pengukuran/indikator yang digunakan berbeda dari penelitian sebelumnya yakni, menggunakan pendapat teori Sinergitas oleh Covey (Maulana, 2019) yang menyatakan bahwa sinergitas dapat diukur melalui dua indikator, yaitu komunikasi dan koordinasi. Selain itu, lokasi penelitian yang dipilih juga berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu di Kabupaten Nabire.

1.5. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup dalam penertiban pembuangan sampah di Pantai Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

II. METODE

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yakni cara untuk menjelajahi dan memahami makna dari perilaku individu dan kelompok, serta untuk menggambarkan masalah sosial atau kemanusiaan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan analisis data dilakukan secara induktif/kualitatif, serta hasil penelitian lebih berorientasi pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian (Danim, 2002). Dan dari hasil yang diperoleh dapat terbentuk sebuah kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang ada yaitu tentang peran tim pendamping keluarga dalam Program Keluarga Harapan di Kota Ternate.

Peneliti mengumpulkan data secara triangulasi data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Simangunsong, 2017). Teknik-teknik ini merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diamati. Dengan demikian, data yang didapatkan bersifat valid (menggambarkan kebenaran), reliabel (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, informan dipilih menggunakan metode *purposive sampling* untuk mendapatkan sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu bahwa individu tersebut memiliki informasi yang relevan dan dapat membantu memahami masalah yang sedang diteliti (Sugiyono, 2022). peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 16 orang informan yang terdiri

dari Kepala Satuan Pamong Praja, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Produk Hukum Daerah, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kepala Seksi Penanganan Sampah, dan masyarakat. Informan-informan diatas dipilih berdasarkan pengalaman dan pengetahuan terkait penelitian yang dilakukan yaitu dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup. Adapun analisisnya menggunakan teori Sinergitas oleh Covey (Maulana, 2019) yang menyatakan bahwa sinergitas dapat diukur melalui dua indikator, yaitu komunikasi dan koordinasi. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 di dua lokasi penelitian, yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah selama 21 hari dari tanggal 6 sampai dengan 25 Januari 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup dalam penertiban pembuangan sampah di Pantai Nabire menggunakan teori sinergitas menurut Covey (Maulana, 2019) yang menyatakan bahwa sinergitas dapat diukur melalui dua indikator, yaitu komunikasi dan koordinasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Komunikasi

Dimensi komunikasi merupakan fondasi awal dalam menjalin sinergi antarinstansi. Dalam konteks sinergitas antara Satpol PP dan DLH, komunikasi mencakup penyampaian informasi, pemahaman terhadap pesan, hingga kelancaran proses pelaporan dan tindak lanjut di lapangan. Terdapat tiga indikator utama dalam dimensi ini:

a. Pesan dapat diterima

Komunikasi antarinstansi berjalan baik apabila pesan yang disampaikan oleh salah satu pihak, baik itu berupa arahan teknis, laporan pelanggaran, maupun permintaan tindak lanjut, dapat diterima secara utuh oleh pihak lainnya. Dalam praktiknya, DLH sering kali memberikan laporan mengenai titik-titik rawan pembuangan sampah sembarangan kepada Satpol PP untuk ditindaklanjuti secara hukum. Sebaliknya, Satpol PP juga menyampaikan hasil patroli yang menemukan pelanggaran perda kepada DLH untuk dilakukan pembersihan atau edukasi lanjutan. Artinya, tidak terjadi salah paham atau kehilangan konteks dalam komunikasi antar instansi.

b. Pesan disetujui

Selain dapat diterima, penting juga agar pesan atau informasi yang disampaikan memperoleh persetujuan dari pihak penerima, dalam arti mereka mengakui pentingnya pesan tersebut dan bersedia menindaklanjutinya. Misalnya, ketika DLH mengajukan permintaan untuk dukungan Satpol PP dalam kegiatan penertiban warga yang membuang sampah sembarangan, permintaan tersebut disetujui karena dianggap relevan dengan fungsi penegakan perda Satpol PP.

c. Tidak adanya hambatan dalam komunikasi

Komunikasi yang efektif tidak hanya berhenti pada penyampaian, tetapi juga melibatkan kelancaran dalam melanjutkan pesan kepada level pelaksana. Dalam praktiknya, baik DLH maupun Satpol PP memiliki jalur

komunikasi internal yang jelas, sehingga pesan yang disepakati di tingkat pimpinan dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan.

Komunikasi antara kedua instansi telah terjalin cukup baik. Informasi dan pesan yang disampaikan dari DLH ke Satpol PP, seperti lokasi-lokasi rawan pelanggaran, dapat diterima dan ditindaklanjuti dengan cepat. Satpol PP juga tidak bertindak secara sepihak, melainkan menunggu laporan teknis dan berkoordinasi terlebih dahulu, yang menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan antar instansi tidak hanya diterima, tetapi juga disetujui dan diproses secara kolaboratif.

3.2. Koordinasi

Koordinasi merupakan bentuk nyata dari kerja sama yang telah dibangun melalui komunikasi. Dalam konteks pengelolaan sampah di Pantai Nabire, koordinasi antara Satpol PP dan DLH bertujuan agar tugas masing-masing instansi dapat saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Tiga indikator koordinasi yang penting antara lain:

a. Pembagian Tugas

Satpol PP dan DLH memiliki tugas pokok yang berbeda namun saling melengkapi. DLH bertugas dalam hal operasional pengangkutan sampah, penyediaan tempat sampah, serta edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah. Sementara itu, Satpol PP bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) terkait ketertiban umum dan kebersihan, termasuk memberi sanksi kepada masyarakat atau pelaku usaha yang melanggar aturan tentang pembuangan sampah. Pembagian tugas ini sudah cukup jelas dan dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

b. Sinkronisasi Kegiatan

Sinkronisasi dilakukan melalui perencanaan kegiatan bersama, seperti patroli gabungan, kegiatan bersih pantai, dan sosialisasi perda ke masyarakat pesisir. Sinkronisasi kegiatan ini agar Satpol PP dan DLH dapat bersinergi untuk menertibkan para pelanggar sehingga dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, ketika DLH melaksanakan kegiatan bersih-bersih pantai, Satpol PP turut hadir untuk memastikan tidak ada masyarakat yang membuang sampah saat kegiatan berlangsung, serta menindak tegas pelaku pelanggaran.

c. Monitoring

Monitoring dilakukan untuk menilai efektivitas dari kegiatan yang sudah dilakukan bersama. Baik DLH maupun Satpol PP melakukan monitoring secara berkala untuk melihat apakah sampah di Pantai Nabire berkurang, apakah masyarakat mulai patuh pada aturan, serta apakah sosialisasi yang dilakukan membuahkan perubahan perilaku masyarakat.

Permasalahan sampah di kawasan Pantai Nabire menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kabupaten Nabire. Banyaknya tumpukan sampah yang berserakan menunjukkan perlunya penanganan terpadu, bukan hanya dari sisi pengangkutan dan pembersihan, tetapi juga dari sisi penegakan aturan dan perubahan perilaku masyarakat. Dalam hal ini, sinergitas antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi kunci strategis dalam menghadapi persoalan ini.

Sisi koordinasi, pembagian tugas sudah cukup jelas. DLH menangani aspek teknis dan lingkungan, sementara Satpol PP fokus pada aspek ketertiban dan hukum. Mereka juga menyusun jadwal kegiatan bersama, misalnya dalam bentuk patroli gabungan, yang melibatkan personil dari kedua instansi.

3.3. Kendala Sinergitas antar Satpol PP dengan Dinas Lingkungan Hidup

Sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nabire dalam menertibkan pembuangan sampah di kawasan Pantai Nabire merupakan upaya yang sangat strategis dalam menciptakan kawasan wisata yang bersih, sehat, dan tertib. Kedua instansi ini memiliki peran yang saling melengkapi: Satpol PP bertugas dalam penegakan peraturan daerah, sementara DLH menangani aspek teknis pengelolaan sampah.

Namun demikian, dalam implementasinya, sinergitas ini dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat sinergitas kedua instansi. Kendala-kendala tersebut mencakup aspek regulasi dan kewenangan, keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta tantangan dalam komunikasi dan koordinasi antar instansi. Untuk memahami kendala ini secara lebih mendalam, dapat dianalisis melalui dua dimensi utama sinergitas, yaitu komunikasi dan koordinasi, yang masing-masing memiliki indikator khusus.

a. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya menjadi kendala berikutnya dalam sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup. Baik dari sisi personil, anggaran, maupun fasilitas, kedua instansi ini masih menghadapi berbagai tantangan. Dari segi personil, jumlah anggota Satpol PP yang bertugas di lapangan untuk melakukan penertiban sering kali tidak mencukupi. Dengan cakupan wilayah yang luas dan jumlah masyarakat yang cukup banyak, personil Satpol PP yang terbatas membuat proses pengawasan terhadap pembuangan sampah menjadi kurang optimal. Demikian pula dengan Dinas Lingkungan Hidup, yang memiliki jumlah petugas kebersihan yang terbatas untuk menangani pengangkutan dan pengelolaan sampah di Pantai Nabire.

Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kurangnya efektivitas dalam pengelolaan sampah dan penegakan hukum. Karena anggaran yang terbatas akhirnya pihak DLH sendiri memanfaatkan anggaran yang ada untuk memenuhi kebutuhan yang penting sehingga program yang dibuat dapat berjalan seoptimal mungkin dan untuk program yang belum bisa dikerjakan akan di lakukan pada penyusunan anggaran berikut di tahun mendatang.

Selain itu, fasilitas pendukung seperti tempat sampah yang memadai, armada pengangkut sampah yang cukup, dan peralatan penegakan hukum yang memadai masih menjadi kendala utama. Banyak kendaraan pengangkut sampah yang usianya sudah tua dan sering mengalami kerusakan, sehingga proses pengangkutan sampah menjadi terhambat. Begitu pula dengan kurangnya sarana teknologi yang dapat membantu dalam pemantauan dan penegakan hukum, seperti kamera pengawas atau aplikasi pelaporan pelanggaran lingkungan.

b. Partisipasi Masyarakat

Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan sampah di Pantai Nabire adalah partisipasi masyarakat. Sayangnya, tingkat kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih tergolong

rendah. Beberapa masyarakat masih memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama di kawasan yang tidak terjangkau oleh petugas kebersihan. Faktor lainnya adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, termasuk praktik pemilahan sampah dari rumah.

Selain itu, kurangnya insentif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program kebersihan juga menjadi tantangan. Meskipun telah ada inisiatif seperti bank sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, partisipasi masyarakat masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi serta minimnya fasilitas pendukung seperti tempat pembuangan sampah sementara yang memadai.

Program edukasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP melalui media sosial, radio, serta penyuluhan langsung memang telah memberikan dampak positif, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam hal cakupan dan efektivitas. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang memadai tentang program-program kebersihan yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.

3.4. Upaya Mengatasi Kendala Sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup

Sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan elemen penting dalam pengelolaan lingkungan, khususnya di kawasan wisata seperti Pantai Nabire. Namun, berbagai kendala seperti keterbatasan SDM, minimnya sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat, menjadi tantangan tersendiri dalam kolaborasi ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang menyentuh dimensi komunikasi dan koordinasi secara simultan.

a. Peningkatan kualitas SDM dan Penguatan Sarana Prasarana

1. Pelatihan dan Pendidikan bagi Petugas
 - a) Petugas Satpol PP dibekali pelatihan tentang penegakan hukum yang humanis, sementara DLH fokus pada teknik pengelolaan sampah modern.
 - b) Dimensi Komunikasi: Pesan diterima dan disetujui melalui pelatihan bersama yang membentuk pemahaman dan kesamaan pendekatan.
 - c) Dimensi Koordinasi: Pembagian tugas pasca pelatihan menjadi lebih proporsional dan kegiatan bersama lebih terstruktur.
2. Penambahan Personel Lapangan
 - a) Rekrutmen tenaga baru dibutuhkan untuk mengurangi beban kerja dan memperkuat pengawasan.
 - b) Koordinasi menjadi lebih lancar dengan jumlah petugas yang memadai.
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Memadai
 - a) Penambahan tempat sampah, armada, dan perbaikan TPA menjadi prioritas.
 - b) Komunikasi visual melalui fasilitas yang disediakan memperkuat pesan kampanye kebersihan.
 - c) Koordinasi antar instansi dalam penempatan dan pemanfaatan sarana menjadi kunci efektivitas.

b. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat melalui Sosialisasi dan Kampanye

Peningkatan kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Tanpa dukungan dari masyarakat, berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, strategi sosialisasi dan kampanye harus lebih diintensifkan agar masyarakat memahami pentingnya membuang sampah pada tempatnya serta berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dari kedua pihak sudah melakukan sosialisasi secara langsung pada Masyarakat. Kedua instansi menyadari bahwa peningkatan kesadaran Masyarakat tidak hanya dengan membuat kebijakan saja namun dengan mensosialisasikan kepada Masyarakat sehingga Masyarakat lebih memahami kebijakan yang dibuat oleh Satpol PP dan DLH terkait pentingnya kebersihan lingkungan dan pentingnya membuang sampah pada tempatnya.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat antara lain:

1. Sosialisasi Secara Langsung:
 - a) Melakukan kegiatan penyuluhan di berbagai komunitas, sekolah, dan kelompok masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang dampak dari pembuangan sampah sembarangan.
 - b) Menggunakan pendekatan berbasis komunitas agar Masyarakat lebih merasa memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekitar.
2. Kampanye Media Sosial dan Elektronik:
 - a) Memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah dan sanksi bagi pelanggar.
 - b) Menayangkan iklan layanan di televisi dan radio RRI untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang mungkin belum memiliki akses ke media sosial.
3. Program Insentif bagi Masyarakat:
 - a) Mendorong inisiatif bank sampah dengan memberikan keuntungan finansial bagi warga yang aktif dalam memilah dan mendaur ulang sampah.
 - b) Menyelenggarakan kompetisi kebersihan antar RT/RW untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam menjaga kebersihan lingkungan.
4. Pemberian Denda atau Sanksi Sosial bagi Pelanggar:
 - a) Pemberian sanksi sosial seperti kerja bakti membersihkan Halaman Kantor bupati bagi warga yang terbukti membuang sampah disekitar area Pantai Nabire, maupun disembarang tempat.
 - b) Penerapan denda yang lebih tegas bagi pelanggar yang tertangkap tangan membuang sampah tidak pada tempatnya.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peneliti menemukan temuan penting yakni sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup dalam penertiban pembuangan sampah di Pantai Nabire belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala seperti, kekurangan

sumber daya manusia dan fasilitas, serta kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Berbeda dengan temuan Penelitian Petty Sari Sitompul (Sitompul, 2019), menemukan bahwa partisipasi pro aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kotawaringin Timur telah berjalan dengan baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah setempat dengan komunitas masyarakatnya. Sinergi Satpol PP dan DLH sebagai kunci berjalannya program K3 di wilayah perkotaan.

Layaknya program lainnya, penertiban pembuangan sampah di Pantai Nabire memiliki berbagai kekurangan, diantaranya adalah keterbatasan sumber daya dan kurangnya partisipasi masyarakat layaknya temuan Penelitian Mohammad Nur Shobah (Shobah, 2023). Temuan ini memperkuat temuan penelitian Azriel Shah Pahlevi (Pahlevi, 2024), bahwa penghambat dalam pelaksanaan strategi pengelolaan sampah berkelanjutan adalah terus bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan meningkatnya jumlah timbulan sampah dan kurangnya kesadaran serta wawasan masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan yang baik. Penelitian Maulana Wahiduddin juga memiliki temuan yang sama, bahwa tujuan, kebijakan, dan program Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat sudah berjalan dengan baik. Walaupun dalam prosesnya masih terdapat hambatan yang dialami Satpol PP baik karena faktor eksternal maupun internal (Ahmad, 2024).

Partisipasi masyarakat yang belum maksimal menjadi kendala utama dalam penertiban pembuangan sampah layaknya temuan penelitian Linda Trisyani (Trisyani, 2019), menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan (DLHK3) Kota Banda Aceh masih memiliki PR yang harus segera diselesaikan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan (DLHK3) Kota Banda Aceh terutama mengenai sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan Kota dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.

Upaya dalam mengatasi kendala sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan penguatan sarana dan prasana dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye. Sama halnya dengan temuan penelitian Azriel Shah Pahlevi (Pahlevi, 2024), menemukan bahwa dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan membuat strategi pengelolaan sampah yang berfokus pada penguatan implementasi regulasi, pengembangan sumber daya manusia, optimalisasi sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi dan inovasi.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup dalam penertiban pembuangan sampah di Pantai Nabire masih menghadapi beberapa hambatan yakni keterbatasan sumber daya dan kurangnya partisipasi masyarakat. Keterbatasan sumber daya menjadi kendala berikutnya dalam sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup. Baik dari sisi personil, anggaran, maupun fasilitas, kedua instansi ini masih menghadapi berbagai tantangan. Tingkat kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih tergolong rendah. Beberapa masyarakat masih memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama di kawasan yang

tidak terjangkau oleh petugas kebersihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menemukan solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut sangat penting dalam menunjang sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup dalam penertiban pembuangan sampah di Pantai Nabire secara optimal di Kabupaten Nabire.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Meskipun Sinergi dari kedua instansi, permasalahan volume sampah yang tinggi dan kurangnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama. Satpol PP telah menjalankan perannya dalam penegakan Peraturan Daerah melalui pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran, sementara Dinas Lingkungan Hidup berfokus pada pengelolaan teknis sampah serta pelaksanaan edukasi kepada masyarakat. Namun, implementasi sinergitas antara keduanya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala seperti, kekurangan sumber daya manusia dan fasilitas, serta kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Meskipun demikian, sinergitas ini telah memberikan dampak positif dalam beberapa aspek, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat, pengurangan sampah di titik-titik krusial, serta munculnya partisipasi dari pihak swasta dan komunitas lokal. Hal ini menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup memiliki potensi besar dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan berkelanjutan jika terus dikembangkan dan diperbaiki.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu, adanya keterbatasan informasi dalam meneliti dan keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti selama proses penelitian dilaksanakan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan bentuk sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup dalam penertiban pembuangan sampah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire dan jajarannya, dan masyarakat sekitar pantai Nabire serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. W. (2024). *Analisa terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban pembuangan sampah di kota Pekanbaru Provinsi Riau*. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18610>
- Akomea-Frimpong, I., Tetteh, P. A., Ofori, J. N. A., Tumpa, R. J., Pariafsai, F., Tenakwah, E. S., Asogwa, I. E., Vanapalli, K. R., Adu-Gyamfi, G., Kukah, A. S., & Tenakwah, E. J. (2024). A bibliometric review of barriers to circular economy implementation in solid waste management. *Discover Environment*, 2(1). <https://doi.org/10.1007/s44274-024-00050-4>

- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Harry Mulya Zein, M., Jouhairiah Mahedar, S., Septiani, S., Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, P., & Manajemen Pemerintahan, F. (2024). Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah: Evaluasi Model Governance di Indonesia. *Sisca Septiani INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 13893–13905. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Hazheer, A. W., Ehsan, H., & Anwari, G. (2023). Investigating the solid waste recycling management in Kabul City, Afghanistan. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 13(4), 739–747. <https://doi.org/10.29244/jpsl.13.4.739-747>
- Hendra, A., Setiawan, I., & Handayani, N. (2024). *COLLABORATIVE GOVERNANCE: Suatu Studi Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Zero Waste Zero Emission di Kota Malang Provinsi Jawa Timur*. Penerbit Rtujuh Media Printing.
- Mahajan, R. (2023). Environment and Health Impact of Solid Waste Management in Developing Countries: A Review. *Current World Environment*, 18(1), 18–29. <https://doi.org/10.12944/cwe.18.1.3>
- Mwanza, B. G. M. (2024). A Bibliometric Analysis of Sustainable Solid Waste Management Technologies using Scopus Database. *SSRN Electronic Journal*, 3(3), 66–77. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4890116>
- Pahlevi, A. S. (2024). *Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di kota Tangerang Selatan Provinsi Banten*. 1–23. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19300>
- Shobah, M. N. (2023). *Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Ketertiban Kebersihan Dan Keindahan Wilayah Perkotaan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah*. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12403>
- Shreya, M., Nimal Yughan, V., Katyal, J., & Ramesh, R. (2023). Technical solutions for waste classification and management: A mini-review. *Waste Management and Research*, 41(4), 801–815. <https://doi.org/10.1177/0734242X221135262>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sitompul, P. S. (2019). Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan Wilayah Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16856>
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Trisyani, L. (2019). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan kota dalam mewujudkan keindahan kota Banda Aceh*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9219>